

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE
AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP TINDAKAN
PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN**

ARTIKEL ILMIAH



oleh :

ANNISA' RAHAYU

2013310541

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

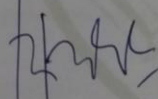
2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Annisa' Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Desember 1995
N.I.M : 2013310541
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 22 Agustus 2017



(Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si., CTA)

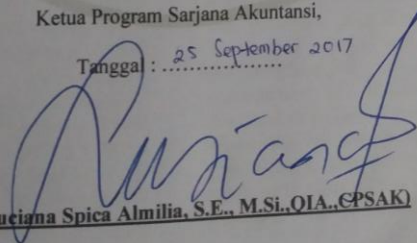
Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal : 18 September 2017



(Indah Hapsari, S.Ak., M.A., Ak.)

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 25 September 2017



(Dr. Luciana Spica Almilta, S.E., M.Si., QIA., CPSAK)

**THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AUDIT COMMITTEE,
FIRM SIZE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AGAINST
CORPORATE TAX AVOIDANCE**

Annisa' Rahayu

2013310541

STIE Perbanas Surabaya

Email: nnisarahayu07@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the institutional ownership, audit committee, firm size, and corporate social responsibility against corporate tax avoidance on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) 2013-2015. The sample used in this study is a manufacturing company listed on the Indonesian stock exchange is based on criteria that have been set. The sampling method used is purposive sampling and testing this hypothesis using multiple linear regression analysis. Calculation of tax avoidance in this study using a ETR (Effective Tax Rate) and the result of this study showed that the independent variable firm size significantly influence the tax avoidance, but the variables are institutional ownership, audit committee and corporate social responsibility has no effect on corporate tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, institutional ownership, audit committee, firm size, corporate social responsibility.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan bagi Negara yang berasal dari masyarakat. Rata-rata wajib pajak badan masih menganggap bahwa pajak adalah suatu beban karena pada umumnya sebuah badan usaha atau perusahaan tidak menginginkan berkurangnya pemasukan sehingga mereka akan berusaha meminimalisir biaya dengan cara meminimalkan biaya untuk memaksimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk biaya pajak. Strategi

perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak untuk memaksimalkan laba dilakukan dengan praktik penghindaran pajak.

Realita yang membuktikan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Titiok dan Anni (2016) mengenai tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia yang menyatakan bahwa beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah baru senilai 35%, dan pembayaran kas pajak yang telah dibayarkan saat ini mencapai 40%, kemudian beban

pajak tangguhan yang dibayarkan kepada pemerintah atas total aset yang dimiliki perusahaan hanya berkisar 5%, hal-hal tersebut membuktikan bahwa tren penghindaran pajak pada tahun 2001-2014 cukup tinggi.

Contoh lain kasus penghindaran pajak yaitu PT RNI yang menggantungkan hidup dari hutang afiliasi dimana saat pemilik memberikan modal malah dicatat sebagai hutang, jika hutang perusahaan semakin besar maka akan mengurangi pajak, dalam laporan keuangannya pun tercatat kerugian yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pajak yang dibayarkan oleh PT RNI kepada negara. Laporan keuangan PT RNI 2014 tercatat hutang sebesar Rp 20,4 miliar, sementara omset perusahaan hanya 2,178 miliar. Menteri keuangan mengatakan laporan keuangannya sudah tidak logis karena itulah oleh kanwil DJP khusus dilakukan pemeriksaan. (KOMPAS.com, 2016).

Tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kinerja manajemen atau faktor-faktor internal lainnya. Setiap perusahaan pasti mempunyai kepentingan tersendiri oleh karena itu perusahaan harus meminimalisir terjadinya konflik-konflik antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Pada umumnya perusahaan memberikan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Adanya lembaga institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat

tinggi sehingga potensi penghindaran pajak dapat ditekan.

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan membuat peningkatan pengawasan kepada kinerja manajemen agar kinerja yang dihasilkan dapat optimal, karena kepemilikan saham menggambarkan suatu wewenang yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin banyak investasi yang diberikan kepada perusahaan oleh pihak institusional, akan membuat sistem pengawasan dalam perusahaan lebih tinggi. Dalam praktiknya kepemilikan institusional lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial dalam fungsi pengawasan.

Menurut penelitian Deddy, Rita, dan Kharis (2016) kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Putu dan IGK Agung (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adanya komite audit dalam perusahaan adalah untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Hrawaty, 2010 dalam Putu dan IGK Agung, 2016). Komite audit dapat mencegah asimetri informasi karena komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan-masukan kepada

manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan tersebut.

Wewenang yang dimiliki oleh komite audit dapat mencegah segala tindakan yang tidak diinginkan terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Komite audit dapat memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengontrol perusahaan agar beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap masalah-masalah seperti benturan kepentingan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Apabila manajemen perusahaan diawasi dengan ketat, maka informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif dapat dihasilkan oleh perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013 dalam Putu dan IGK Agung, 2016). Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putu dan IGK Agung (2016) komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan, menurut Sabar (2016) ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Pembayaran pajak perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar atau perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia yang baik, dalam hal ini adalah ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan besar yang

memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan secara optimal.

Dalam penelitian I Made dan Putu (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan yang total asetnya besar cenderung menghasilkan laba yang juga besar, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan semakin besar. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Deddy, Rita, Kharis (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dapat memaksimalkan laba dan aliran arus kas dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Tetapi hal tersebut menjadi suatu dilema etika bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, karena jika perusahaan melakukan penghindaran pajak maka akan berpengaruh terhadap dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka secara sosial perusahaan dapat dikatakan tidak bertanggung jawab (Huseynov, 2012).

Watson (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan yang CSR-nya rendah dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang peduli sosial. Maka perusahaan bisa saja melakukan segala cara untuk meminimalisir pembayaran pajak

dan mengoptimalkan profitabilitas dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Dyah dan Supriyadi (2015) dalam penelitiannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014), menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada regulator supaya dapat memperbaiki aturan perpajakan agar tidak ada celah lagi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengambil kembali topik mengenai penghindaran pajak ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak suatu perusahaan.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan berasumsi bahwa setiap orang memiliki egoisme yaitu lebih memprioritaskan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer akan fokus pada kepentingan

pribadinya juga. Adanya benturan kepentingan inilah yang akan menimbulkan teori keagenan.

Kaitan teori dengan penelitian ini adalah karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham atau pemegang saham dengan manajemen maka perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak profesional seperti pemilik institusional dan juga komite audit. Jika pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai harapan maka tidak akan ada pihak yang bisa bertindak curang demi kebaikannya sendiri seperti contohnya tindakan penghindaran pajak.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sebuah teori yang membahas interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan didasarkan pada hasil akhir atau output yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada masyarakat sesuai dengan kekuatan yang dimiliki perusahaan (Imam, 2007:412).

Kaitan teori dengan penelitian ini, dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus sadar bahwa hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan sangat mempengaruhi citra perusahaan. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan dituntut untuk mampu melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai dan batasan-batasan norma yang berlaku di masyarakat. Apabila perusahaan ingin menjaga citra perusahaan maka perusahaan perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,

investor, kreditor, konsumen, dan juga pemerintah. Dalam upaya menjaga kepercayaan dari masyarakat termasuk diantaranya adalah pemerintah tersebut, maka kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindak penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan kepemilikan institusional akan meminimalisir konflik kepentingan manajemen yang mungkin berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusi maka akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, dikarenakan pemilik institusi memiliki fungsi untuk memantau dan mengendalikan manajemen untuk taat terhadap aturan perpajakan (pohan,2009). Ketika melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak, persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau yang dimiliki oleh para pihak institusi akan menyebabkan timbulnya dividen, beban dividen tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak

Komite audit dapat mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan pengendalian internal, karena BEI telah mewajibkan semua perusahaan untuk

membentuk dan memiliki komite audit yang minimal terdiri dari tiga orang yaitu ketua komite audit, anggota komite audit yang berasal dari komisaris (maksimal hanya 1 orang), dan anggota komite audit lainnya yang berasal dari pihak eksternal yang independen (Ida, 2016). Segala keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit membuat komite audit lebih mengerti mengenai kelemahan dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga komite audit dapat memberikan saran secara profesional untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

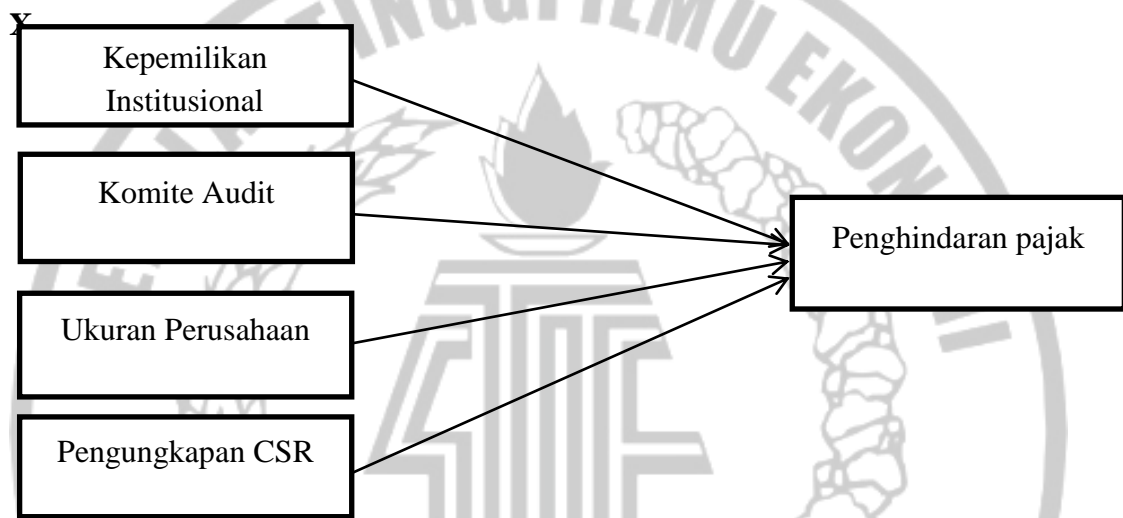
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Hasibuan (2009) dalam Teguh (2015), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat dikelompokkan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Apabila perusahaan dikatakan besar maka besar pula aset yang dimilikinya. Dalam upaya mengurangi beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan cara menggunakan beban penyusutan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut karena beban penyusutan dan semua biaya-biaya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Pengaruh CSR Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat menyeimbangkan kinerja ekonomi dengan cara mengoptimalkan laba, kinerja lingkungan dengan cara peduli terhadap lingkungan alam sekitar, dan kinerja sosial dengan cara peduli terhadap masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula pandangan masyarakat terhadap reputasi perusahaan (Rina, 2014). Dalam hal perpajakan, reputasi baik juga dapat diperoleh dari kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak kepada negara.



GAMBAR 1
KERANGKA PEMIKIRAN

Hipotesis Penelitian

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H2 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H4 : *Corporate Social Responsibility*

berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu pemilihan kepemilikan Institusional, Komite audit, ukuran perusahaan, dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak. Jenis dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015 dengan kriteria tertentu. Peneliti memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur jumlahnya lebih banyak dalam Bursa Efek Indonesia dan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap pemenuhan pajak, dan rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki laba yang tidak sedikit dari aktivitas yang dilakukannya.

Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berikut adalah definisi mengenai variabel-variabel berikut:

1. Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak
2. Variabel Independen (X)
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah tindakan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang dalam peaturan perundang-undangan perpajakan namun tidak melanggar hukum pajak (Dyah, 2015).

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Perhitungan ETR menggunakan model dari Lanis dan Richardson (2012).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi yang mana dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Fadhilah, 2014). Pengukuran dalam penelitian ini akan diukur menggunakan persentase saham yang dimiliki institusi yaitu perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan lainnya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{saham institusional}}{\sum \text{saham yang beredar}}$$

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan. Pengukuran komite audit dengan menggunakan rasio yaitu :

$$KA = \sum \text{komite audit perusahaan}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Besar kecilnya perusahaan ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Gusti, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset.

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR adalah kegiatan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan hidup atas akibat dari kegiatan-kegiatan usahanya (Dyah, 2015). Cara mengukur CSR dengan melihat 7 indikator pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu lingkungan, energi, kesehatan, keselamatan tenaga kerja, lain-lain yang berkaitan dengan tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{CSRI}_j = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$$

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan

diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang memiliki kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu:

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 hingga 2015.
- Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian.
- Perusahaan yang menggunakan nilai satuan Rupiah dalam laporan keuangannya.
- Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
- Memiliki informasi mengenai kepemilikan institusional, komite audit dan CSR.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kuortosis (mengukur puncak dari distribusi data) dan skewness (kemencengan distribusi). Dimana data yang terdistribusi secara normal

mempunyai nilai skewness dan kurtosis mendekati nol.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda dapat dikatakan sebagai model yang baik apabila model tersebut memenuhi asumsi klasik, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal (Imam, 2013:160). Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar atau sama dengan dari 5% atau 0,05.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu varian pengganggu yang tidak mempunyai varian yang sama untuk setiap observasi, sehingga dapat mengakibatkan penaksiran regresi yang tidak efisien. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Imam, 2013:139). Model dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas jika variabel bebas secara statistik signifikan berpengaruh pada absolut residual. Nilai signifikansi untuk terbebas dari gejala heteroskedastisitas yaitu lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih variabel independen terdapat korelasi atau hubungan dengan variabel independen lainnya

(Imam, 2013:105). Adanya multikolonieritas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari nilai *tolerance* adalah 0.01 dan batas VIF adalah 10. Apabila nilai *tolerance* dibawah 0,01 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode tahun berjalan (periode t) dengan kesalahan pengganggu dalam periode tahun sebelumnya (periode t-1) (Imam, 2013:110). Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan *run test*. Apabila nilai signifikan ≥ 0.05 maka H_0 diterima yang berarti bahwa residual adalah acak atau random dengan kata lain antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti bahwa residual tidak random dengan kata lain antar residual terdapat hubungan korelasi.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, skewness (Imam, 2013:19).

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Mean | Std. Deviasi |
|--------------------|-----|---------|----------|---------|--------------|
| Kep. Institusional | 133 | 0,22 | 0,98 | 0,6941 | 0,17992 |
| Komite Audit | 133 | 2,00 | 5,00 | 3,1504 | 0,43513 |
| SIZE | 133 | 21,46 | 33,13 | 28,5515 | 1,86732 |
| CSR | 133 | 0,00 | 0,59 | 0,1824 | 0,12634 |
| ETR | 133 | 0,11 | 0,49 | 0,2629 | 0,06261 |

Sumber : Data diolah

Statistik Deskriptif Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 133 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari data perusahaan manufaktur selama tiga tahun (2013-2015). Nilai rata-rata variabel tersebut sebesar 0,2629 dengan standar deviasi sebesar 0,06261. Perbandingan antara nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi berada dibawah nilai rata-rata. Hal ini berarti tingkat variasi data dari penghindaran pajak (ETR) terbilang kecil atau homogen.

Nilai minimum penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0,11 yang dimiliki oleh PT Budi Starch and Sweetener Tbk pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban pajak PT Budi Starch and Sweetener Tbk pada tahun 2013 sebesar 11% dari total laba sebelum pajak. Nilai maksimum variabel penghindaran pajak (ETR) sebesar 0,49 dimiliki oleh PT Lionmesh Prima Tbk pada tahun 2015. Kemungkinan PT Lionmesh Prima Tbk melakukan praktik penghindaran pajak sangat rendah.

Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 133 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari data perusahaan manufaktur selama tiga tahun (2013-2015). Nilai minimum dari variabel kepemilikan institusional (KI) adalah sebesar 0,22 yang dimiliki oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2014 & 2015. Sedangkan nilai maksimum dari variabel kepemilikan institusional (KI) adalah sebesar 98% yang dimiliki oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna pada tahun 2013-2015.

Selama masa periode tahun 2013-2015 rata-rata untuk variabel kepemilikan institusional (KI) adalah 0,6944. Selain itu juga terdapat standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa besar rentang atau jarak antara data satu dengan lainnya. Rentang atau jarak data satu dengan data lainnya yang terdapat pada variabel kepemilikan institusional (KI) adalah 0,18037.

Statistik Deskriptif Komite Audit

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 133 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari data perusahaan manufaktur selama 3 tahun (2013-2015). Nilai minimum

dari variabel komite audit (KA) adalah sebesar 2,00 yang dimiliki oleh PT Merck Tbk pada tahun 2014. Sedangkan nilai maksimum dari variabel komite audit (KA) adalah sebesar 5,00 yang dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk pada tahun 2013-2015 yang mana terdapat 5 orang komite audit dalam perusahaan.

Selama tahun 2013-2015 rata-rata untuk variabel komite audit (KA) adalah 3,1504 yang berarti rata-rata perusahaan mempunyai anggota komite audit sebanyak 3 orang. Selain itu juga terdapat standar deviasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar rentang atau jarak data satu dengan yang lainnya. Rentang atau jarak antara data satu dengan data yang lainnya yang terdapat pada variabel komite audit (KA) adalah 0,43513. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata komite audit (KA) lebih besar dari nilai standar deviasinya maka dapat dikatakan bahwa variasi data yang terjadi sangat rendah dan data tersebut bersifat homogen

Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 133 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari data perusahaan manufaktur selama tiga tahun (2013-2015). Nilai minimum dari variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 21,46 jika dalam rupiah adalah total aset sebesar Rp 2.084.567.189 yang dimiliki oleh PT Argha Karya Prima Industry pada tahun 2013. Sedangkan nilai maksimum dari ukuran perusahaan adalah sebesar

33,13 jika dalam rupiah adalah total aset sebesar Rp 245.435.000.000.000 yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk pada tahun 2015.

Selama tahun 2013-2015 rata-rata untuk variabel ukuran perusahaan (SIZE) adalah 28,5515 yang berarti rata-rata perusahaan memiliki aset kurang lebih sekitar 2,5 triliun rupiah selain itu juga terdapat standar deviasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar rentang atau jarak antara data satu dengan yang lainnya. Rentang atau jarak antara data satu dengan data yang lainnya yang terdapat pada variabel ukuran perusahaan (SIZE) adalah 1,86732. Hal ini berarti tingkat variasi data yang terjadi sangat rendah sehingga data tersebut bersifat homogen, karena nilai rata-rata ukuran perusahaan (SIZE) lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Statistik Deskriptif Corporate Social Responsibility

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat 133 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari data perusahaan manufaktur selama tiga tahun (2013-2015). Nilai minimum dari variabel CSR adalah sebesar 0,00 yang dimiliki oleh PT Beton Jaya Manunggal Tbk pada tahun 2013. Sedangkan nilai maksimum dari variabel CSR adalah sebesar 0,59 yang dimiliki oleh PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk pada tahun 2013-2015, hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan terhadap masyarakat dan stakeholder lainnya.

Selama tahun 2013-2015 rata-rata untuk variabel CSR adalah

0,1824. Selain itu juga terdapat standar deviasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar rentang atau jarak antara data satu dengan yang lainnya. Rentang atau jarak antara data satu dengan data yang lainnya yang terdapat pada variabel CSR adalah 0,12634.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yang dapat dideteksi uji normalitasnya dengan cara jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) $\geq 0,05$ maka data yang diperoleh berdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000 lalu setelah di outlier nilai signifikansi menjadi $> 0,05$ yaitu 0,057.

Tabel 2
HASIL OUTPUT UJI
NORMALITAS SETELAH
OUTLIER

| | | Unstandardi zed Residual |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| N | | 133 |
| Kolmogorov- Smirnov Z | | 1,333 |
| Asymp. Sig. (2- tailed) | | 0,057 |

Sumber: diolah SPSS

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat diuji dari nilai *varaince inflation*

factor (VIF) dan *tolerance*. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi asumsi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 . Berikut ini merupakan tabel 3 yang merupakan hasil *output* SPSS versi 21 yang menunjukkan hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 3
HASIL OUTPUT UJI
MULTIKOLONIERITAS

| Model | Collinearity Statistics | |
|------------|----------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| (Constant) | | |
| KI | 0,986 | 1,014 |
| KA | 0,900 | 1,111 |
| SIZE | 0,835 | 1,198 |
| CSR | 0,913 | 1,095 |

Sumber: diolah SPSS

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi yaitu dinyatakan tidak ada heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil penelitian ini nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih besar dari sama dengan 0,05 yaitu sebesar 0,865 (KI), 0,905 (KA), 0,961 (SIZE), 0,989 (CSR). Berikut ini merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser*.

Tabel 4
HASIL OUTPUT
HETEROSKEDASTISITAS

| Model | Sig. |
|------------|--------------|
| (Constant) | 0,950 |
| KI | 0,865 |
| KA | 0,905 |
| SIZE | 0,961 |
| CSR | 0,989 |

Sumber: diolah SPSS

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi di dalam penelitian ini dilakukan dengan *run test*. Cara pengujiannya yaitu apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak terdapat hubungan korelasi. Berikut ini merupakan tabel 5 yang merupakan hasil *output* SPSS versi 21 yang menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji *run test*, nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar sama dengan 0,05 yaitu sebesar 0,930.

Tabel 5
HASIL OUTPUT UJI
AUTOKORELASI

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | -0,01067 |
| Number of Runs | 68 |
| Z | 0,088 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,930 |

Uji Hipotesis

Uji Statistik Simultan (Uji-F)

Uji simultan (Uji-F) digunakan untuk menguji apakah antara variabel-variabel bebas X (kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility*) yang dimasukkan dalam model regresi

berpengaruh terhadap variabel terikat Y (penghindaran pajak) secara bersama-sama (Imam, 2013:98). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model regresi fit (baik) dan secara simultan signifikan menjadi penjelas terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan tabel 6 yang merupakan hasil *output* SPSS versi 21 yang menunjukkan hasil uji simultan (uji-F):

Tabel 6
HASIL OUTPUT UJI-F

| Model | Sig. |
|------------|--------------|
| Regression | 0,014 |
| Residual | |
| Total | |

Sumber: diolah SPSS

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti model regresi fit (baik) dan secara simultan signifikan menjadi penjelas terhadap variabel dependen, karena besarnya nilai signifikansi $< 0,05$.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi untuk menunjukkan variasi dalam variabel bebas (independen). Nilai R^2 koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, jika nilai koefisien determinasi mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menerangkan variabel dependen dengan tinggi (kuat), namun apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka nol maka dapat diartikan bahwa variabel

independen dapat menerangkan variabel dependen dengan lemah (Imam, 2013:97). Berikut ini merupakan tabel 7 yang merupakan hasil *output* SPSS versi 21 yang menunjukkan hasil uji koefisien determinan (R^2):

Tabel 7
HASIL OUTPUT KOEFISIEN DETERMINAN (R^2)

| Model | R | Adjusted R Square |
|-------|-------|-------------------|
| 1 | 0,304 | 0,064 |

Sumber: Diolah SPSS

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa nilai adjusted R Square mendekati nol, yaitu sebesar 0,064 atau setara dengan 6,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility* mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 6,4%. Sisanya 93,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. Hasil dari nilai Adjusted R square mendekati nol yang artinya kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya cenderung lemah.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial (uji-t) yaitu alat uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Imam, 2013:98). Hasil output uji-t dapat dilihat pada tabel 8. berdasarkan tabel tersebut, hasil pengambilan hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.12 nilai t menunjukkan angka -1,341 dengan signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,182. Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan kata lain kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.12 nilai t sebesar -1,108 dengan signifikansi lebih besar dari sama dengan 0,05 yaitu sebesar 0,270. Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, dengan kata lain bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.12 nilai t sebesar -2,723 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,007. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, dengan kata lain bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4) Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.12 nilai t sebesar 0,308 dengan signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,758. Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_4 ditolak, dengan kata lain *corporate social*

responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 8
HASIL OUTPUT UJI-T

| Model | T | Sig. |
|------------|--------|--------------|
| (Constant) | 6,549 | 0,000 |
| KI | -1,341 | 0,182 |
| KA | -1,108 | 0,270 |
| SIZE | -2,723 | 0,007 |
| CSR | 0,308 | 0,758 |

Sumber: diolah SPSS

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan dari hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional harusnya memang mampu memainkan peran penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang menyimpang yang hanya untuk mementingkan kepentingan manajemen sendiri. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu dapat memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas segala kesempatan dan wewenang yang dimiliki oleh manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Teguh (2015) dan Putu (2016) yang mengatakan bahwa penghindaran pajak bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan

pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu memang tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja praktik penghindaran pajak bisa terjadi, yang itu berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya komite audit sebagai pengawas yang memantau informasi keuangan dan memantau ketaatan perusahaan terhadap peraturan harusnya dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak perusahaan. Winarsih (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak bisa saja terjadi dikarenakan pembentukan komite audit perusahaan hanya dilakukan untuk memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit. Pembentukan komite audit yang hanya untuk memenuhi peraturan saja mengakibatkan kinerja dari komite audit tidak cukup efektif untuk dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan membuat perusahaan menghindari praktik penghindaran pajak.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa memang keberadaan komite audit dalam perusahaan belum menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal sehingga keberadaannya belum bisa memberikan pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, karena komite

audit tidak berperan aktif dalam pengambilan kebijakan perusahaan, sehingga besar kecilnya jumlah komite audit tidak dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan yang terkait aktivitas penghindaran pajak, tetapi alangkah baiknya para komite audit adalah orang-orang yang ahli dalam bidang perpajakan sehingga dapat mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi atau rendah nilai ukuran perusahaan berdasarkan total asetnya maka akan berdampak pada tingkat nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengindikasikan perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak atau tidak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Putu (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan dengan total aset yang besar akan menyebabkan laba meningkat dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kondisi tersebut bisa terjadi karena laba yang besar akan menyebabkan jumlah beban pajak yang besar pula. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang

lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga sumber daya yang dimiliki akan lebih besar dan memiliki kualitas yang lebih baik dimana perusahaan akan lebih mudah untuk melakukan manajemen pajak agar dapat menghindari pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara CSR dengan penghindaran pajak. Pengukuran CSR dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Sedangkan pengawasan dari pihak yang diberi wewenang terhadap pelaporan CSR juga belum ada sehingga kebenaran dari yang dilaporkan perusahaan mengenai kegiatan CSR perusahaan belum dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan tinggi atau rendahnya tindakan penghindaran pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Pengambilan

sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan di *Indonesian Stock Exchange (IDX)*. Pengujian data yang dilakukan menggunakan alat uji SPSS versi 21 dengan menggunakan analisis data berupa uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis (uji t) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.
- b. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.
- c. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.
- d. *Corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

1. Data penelitian ketika dianalisis statistik menunjukkan nilai residual data tidak berdistribusi normal, sehingga harus dilakukan outlier menggunakan metode *casewise coevariate diagnose*.
2. Hasil uji adjusted R^2 hanya menunjukkan angka sebesar 6,4 persen, yang berarti pengaruh dari variabel independen yang digunakan sangat lemah karena sebesar 93,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Merubah pendekatan model pengukuran lain dalam pengukuran penghindaran pajak untuk memperkuat temuan dalam penelitian selanjutnya, misalnya seperti metode *book tax different*.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel baru misalnya kompensasi rugi fiskal, kualitas audit atau kepemilikan keluarga dalam penelitian sehingga pengaruh variabel lain diluar model yang mempengaruhi penghindaran pajak dapat diungkap.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mengambil sampel lebih banyak dan memperluas periode pengamatan sehingga data yang diperoleh lebih lengkap.

Keterbatasan penelitian

DAFTAR RUJUKAN

- Debby, Masripah dan Vera. 2015. Pengaruh Pemegang Saham Pengendali Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 18. Medan.*
- Deddy, Kharis dan Rita. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting.* Vol 2 No 2. Hal 176-186.
- Dyah Hayu, Supriyadi. 2015. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 18. Medan.*
- Fadhilah dan Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang.* Vol 2 No 1. Hal 607-628.
- Gusti Maya. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis.* Vol 2 No 7. Hal 532-550
- Hasan, Kim I, Teng H and Wu Q. 2016. The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *Bank of Finland Research Discussion Paper 26.* Pp 1-46
- Huseynov, F., and Klamm, Bonnie K. 2012. Tax Avoidance, Tax Management, and Corporate Social Responsibility. *Journal of Corporate Finance.* Vol 2 No 18. Pp 804-827.
- I Made Surya dan Putu Agus. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.* Vol 15 No 1. Hal 584-613.
- Ida Ayu dan Ketut Alit. 2016. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen,

- Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Pehindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 16 No 1. Hal 72-100.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. Vol 3 No 4. Pp : 305-360.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*. No 31. Pp : 86-108.
- La Porta, R., De Silanes, F.L., dan Shleifer, A. 1999. Corporate ownership around the world. *The Journal Of Finance* No 54. Pp : 471-517.
- Pohan, Hotman T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Pehindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*. Vol 4 No 2. Pp 113-135.
- Putu Rista dan IGK Agung. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 16 No 1. Hal 702-732.
- Rusydi dan Dwi Martini. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 17. Mataram*
- Sabar Warsini. 2016. Peran Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit dan Praktik CG Negara dalam Tax Avoidance. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 19. Lampung*.
- Titiek Puji dan Anni Aryani. 2016. Tren Pehindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014.

Jurnal Akuntansi. Vol 20
No 03. hal 375-388.

Teguh Muji W, Yessi Mutia B, dan Rusli. 2015. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi*

Watson, Luke. 2011. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits. *American Taxation Association Midyear Meeting Paper:*

New Faculty/Doctoral Student Research Session (SSRN:
<http://ssrn.com/abstract=1760073>)

Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok, Indonesia.*

www.bisniskeuangan.kompas.com

www.idx.co.id

www.sahamok.com